

**ARGUMENTASI ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM
TERHADAP PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA
PERBUATAN CABUL OLEH DOSEN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456/K/Pid/2014)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

SAVIRA ADELIA

E0012357

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM
TERHADAP PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA
PERBUATAN CABUL OLEH DOSEN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456/K/Pid/2014)

Oleh :

SAVIRA ADELIA

E0012357

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 27 Desember 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sri Wahyuningsih Yulianti', with a large, stylized initial 'S' and a horizontal line extending to the right.

Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H

NIP. 196107211988032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PERBUATAN CABUL OLEH DOSEN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456/K/Pid/2014)

Oleh

SAVIRA ADELIA
E0012357


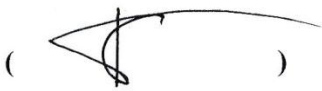

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

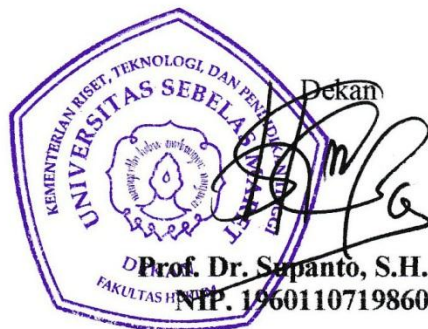
Pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Maret 2017

TIM PENGUJI

1. Nama : Edy Herdyanto SH. MH
NIP : 195706291985031002
Ketua
2. Nama : Kristiyadi SH. M.Hum
NIP : 195812251986011001
Sekretaris
3. Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti SH. MH
NIP : 196107211988032001
Anggota

()
()
()



Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Savira Adelia

NIM : E0012357

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul ARGUMENTASI ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PERBUATAN CABUL OLEH DOSEN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1456K/Pid/2014) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 28 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,



Savira Adelia

E0012357

ABSTRAK

Savira Adelia. 2016. E0012357. ARGUMENTASI ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PERBUATAN CABUL OLEH DOSEN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1456K/Pid/2014). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai argumentasi alasan diajukannya permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas *Judex Factie* dalam Perkara perbuatan Cabul oleh Dosen dengan ketentuan KUHP.

Penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan bahan Hukum. Sedangkan teknik analisis bahan Hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Terdakwa telah memuat syarat materiil sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya *Judex Factie* salah menerapkan hukum tidak mempertimbangkan fakta Yuridis yang terungkap dipersidangan hanya mempertimbangkan sebagian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus Kasasi Perkara perbuatan Cabul oleh Dosen yang dilakukan oleh Terdakwa ini berdasarkan pada pertimbangan Yuridis dan non Yuridis, telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 336/Pid.B/2013/PN.Pms. Menjatuhkan sanksi Pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak Pidana Perbuatan Cabul oleh Dosen dan menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Kata kunci: Pen-Cabulan, Kasasi, Putusan Bebas.

ABSTRACT

Savira Adelia. 2016. E0012357. ARGUMENTATION EXCUSE OF CASSATION APPEALS PUBLIC PROSECUTOR AGAINST ACQUITTAL VERDICT JUDEX FACTIE CASE OF OBSCENE DEEDS BY LECTURER (Study of Supreme Court Verdict Number: 1456K/Pid/2014). Law Writing (Thesis). Faculty of Law Sebelas Maret University of Surakarta.

Research examines and answer issues regarding argumentation excuse of submission cassation appeals Public Prosecutor against Acquittal Verdict Judex Factie case of obscene deeds by Lecturer with provisions of Criminal Procedure Code.

Research used prescriptive and applied of normative research. Sources of law materials used primary law materials and secondary law materials use of bibliography study for law material data collection techniques. Law substance analysis technique used method of deductive syllogism with a pattern of thinking.

Results showed that argumentation excuse of cassation appeals Public Prosecutor in case of obscene deeds committed by the Defendant have loaded for material requirements so in compliance with the provisions of Article 253 Paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code, the regulations does not implemented not as appropriate that it should able to be Judex Factie misapplied the law did not consider juridical facts revealed in court only considers some of the evidence of witnesses and information from the defendant. Consideration of the Supreme Court in deciding the case of obscene deeds by Lecturer committed by Defendant based on juridical and non juridical considerations, in view of Article 256 In Conjunction with Article 193 Paragraph (1) Criminal Procedure Code, the Judges granted cassation appeals Public Prosecutor also canceled Pematang Siantar District Court's Verdict Number: 336/Pid.B/2013/PN.Pms. Also drop down criminal liability against the Defendant who has been proven legally and convincingly by law guilty of obscene deeds case and drop down imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months reduced retention time.

Keywords: Obscene Deeds, Cassation, Acquittal Verdict.

MOTTO

“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafshihi”

Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”. (QS Al-Ankabut 29)

“Dream doesn’t become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work”

Mimpi tidak menjadi kenyataan melalui sihir. Dibutuhkan keringat, tekad dan kerja keras. (Collin Powell)

“Untuk kamu yang sedang berjuang demi sesuatu yang positif, jangan berhenti hingga kamu meraihnya”

(Chelsea Islan)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan kasih sayang-Nya
2. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan mendukung untuk kesuksesan dan keberhasilan penulis
3. Adikku tersayang yang selalu mendukung dan memberi semangat penulis
4. Semua Dosen yang mendidik penulis dalam menyelesaikan studinya
5. Semua sahabat yang menemani dan mewarnai hari-hari penulis
6. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2012 dan Angkatan 2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum yang berjudul ***ARGUMENTASI ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE DALAM PERKARA PERBUATAN CABUL OLEH DOSEN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456/K/Pid/2014)*** dengan baik.

Penulisan Hukum ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Atas segala bantuan yang telah Penulis dapatkan selama menempuh studi sampai dengan terselesaikannya penyusunan Penulisan Hukum ini, Penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya serta Nabi Muhammad SAW serta junjungannya.
2. Orangtua yang sangat saya sayangi dan cintai, Ibu Ika Purwaning Dyah, Bapak Haryanto Tri Putranto, serta Adik saya tercinta Ivan yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dalam penulisan Hukum ini. Memberikan semangat dan motivasi tanpa henti kepada saya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
4. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi agar penulis berusaha meningkatkan prestasi dan selalu giat meraih cita-cita.

6. Bapak Dr. Soehartono S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam memenuhi persyaratan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Ibu Sriwahyuningsih Yulianti, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis, yang di tengah kesibukannya selalu bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan nasihat kepada penulis. Terima kasih banyak atas semua bimbingan dan arahan yang tidak pernah lelah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi hingga selesai.
8. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum, selaku Dosen penulis yang sudah seperti ibu sendiri karena selalu mengerti keluh kesah penulis dan selalu memberi semangat serta jalan keluar penulis di saat ada kesusahan pada proses menempuh kuliah dari semester awal hingga akhir.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Kioge Lando, Dea Arsyandita, Ratri Arum, Hesti Haryanti, Fauzi Laksana, Barata Aji, Vabella Laurina, Cut Riski, Febby Kartika, Bellarihan, Ike Mavita dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani penulis dan memberikan pengalaman berharga suka maupun duka selama menempuh studi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selalu memberikan motivasi serta saran dan masukan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.
11. Cahyo Aji Nugroho yang sudah 1,5 tahun ini selalu sabar, mengalah, memberikan kehidupan yang lebih baik, menemani hidup penulis dalam suka dan duka, dan tidak berhenti-hentinya menyemangati, menemani, mengingatkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga untuk penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Demikian, semoga penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 28 Februari 2017

Penulis,

Savira Adelia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
1. Tujuan Obyektif.....	7
2. Tujuan Subektif	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Pendekatan Penelitian	10
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	10
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
F. Sistematika Penulisan Hukum	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan tentang Argumentasi Hukum	14
2. Tinjauan tentang Judex Factie.....	15
3. Tinjauan tentang Penuntut Umum dan Penuntutan.....	15
4. Tinjauan tentang Kasasi	19
5. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	30
6. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan	32
7. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pen-Cabulan	36
B. Kerangka Pemikiran	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	42
1. Identitas Terdakwa	42
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa.....	42
3. Dakwaan	43
4. Tuntutan	45
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri	45
6. Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum.....	46
7. Amar Putusan Mahkamah Agung RI No 1456 K/Pid/2014...	47
B. Pembahasan	48
1. Kesesuaian Argumentasi Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Judex Factie dalam Perkara Perbuatan Cabul oleh Dosen dengan Pasal 253 KUHAP	48
2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Cabul Oleh Dosen Dengan Pasal 256 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP	58

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	41
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kasus pemerkosaan dan Pencabulan di wilayah hukum Polresta Medan tampaknya sudah sangat memprihatinkan. Terlebih lagi pernyataan Kasat Rekrim Polresta Medan yang mengatakan bahwa akibat banyaknya kasus pemerkosaan dan Pencabulan, ia tidak dapat menangkap pelaku pemerkosaan dan Pencabulan itu. Kasus dugaan pelecehan Seks yang dilakukan Anggiat sudah dilaporkan ke Polres Siantar, dengan nomor STPL/217/V/2013/SU/STR, pada Senin 20 Mei 2013. Dalam surat permohonan Prapid bernomor 02/Prapid/2013/PN/PMS itu, disebutkan kalau Kapolres Siantar, dituding telah melalaikan kewajibannya, karena kasus Cabul yang sudah dilaporkan tiga bulan lalu, Anggiat tak kunjung ditahan. (<http://mahardikanews.com/view/Hukum/686/Kapolres-Siantar-Diprapidkan.html#.WKkV-NJEnIU>)

Perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat menimbulkan peningkatan angka kejahatan dan berdampak pada anggota masyarakat dalam berinteraksi antar sesama. Interaksi di dalam masyarakat sering terjadi pelanggaran baik itu norma sosial maupun norma Hukum, maka dari itu diciptakannya Hukum atau kaidah-kaidah yang di tentukan oleh masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib di dalam interaksi masyarakat.

Banyak kasus Pencabulan seperti yang dilakukan mulai dari yang sekedar gurauan yang bersifat Seksual yang tidak diinginkan sampai tindakan yang hampir menjurus ke pemerkosaan. Kasus-kasus Pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap Korban seperti meraba-raba tubuh si Korban, sampai dengan tindakan-tindakan yang melecehkan orang lain. Padahal dampak yang dihasilkan sama, meski mungkin dalam kadar yang berbeda.

Bentuk Pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang Pencabulan adalah

1. *Exhibitionism Seksual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fondling* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Asas-asas yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencerminkan jaminan dan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (A. Hamzah dalam Mardjono Reksodiputro, 1990: 13). Ada 10 (sepuluh) asas yang ditegaskan dalam Penjelasan KUHAP. Kesepuluh asas ini dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus, yaitu dalam asas-asas umum terdiri atas asas perlakuan yang sama di muka Hukum (*equality before the law*); asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*); hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; hak untuk mendapat bantuan Hukum; hak kehadiran Terdakwa di muka Pengadilan; Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; Peradilan yang terbuka untuk umum; serta asas-asas khusus yang terdiri atas pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan surat perintah secara tertulis; hak seorang Tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan kewajiban Pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan Putusan-Putusannya (Mardjono Reksodipuro, 1990: 13-14)

Menurut Stanko (1996:56) pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai Tindak Pidana Cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan Seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak Pidana Perbuatan Cabul itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya.

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan menyangkut Perbuatan Cabul ada pada Pasal 289-296 KUHP. Kasus kejahatan Perbuatan Cabul ataupun Pelecehan Seksual paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap Penyidikan, Penuntutan, maupun pada tahap Penjatuhan Putusan. Selain kesulitan dalam batasan diatas, juga kesulitan Pembuktian misalnya Perkosaan atau Perbuatan Cabul yang umumnya tanpa kehadiran orang lain. Walaupun banyak kejahatan Pelecehan Seksual yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi Hukuman yang maksimal. Sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang dicantumkan dalam BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) :

- a. Pasal 281-283 (kejahatan terhadap kesopanan).
- b. Pasal 285 (kejahatan pemerkosaan).
- c. Pasal 289-296 (kejahatan Pencabulan).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan Perbuatan Pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan Cabul,

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan Pidana penjara paling Sembilan tahun”.

Para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan, biasanya setelah melalui proses pemeriksaan dan putusan Perkaranya, akan merasa kurang tepat, kurang adil sehingga menimbulkan rasa kurang puas meskipun dalam memutus suatu Perkara Hakim telah mempertimbangkan baik unsur Yuridis maupun non-Yuridis yang melandasi keyakinannya untuk memutus Perkara demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pencari keadilan untuk berdasarkan Hukum dan melalui saluran Hukum yang benar berusaha atau berUpaya mengajukan rasa tidak atau kurang puas atas Putusan Hakim tersebut dengan memohon untuk diuji kembali, Upaya inilah yang dalam Hukum disebut sebagai Upaya Hukum.

Pasal 1 Butir 12 KUHAP menentukan Upaya Hukum adalah “Hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak TerPidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Upaya Hukum ada 2 (dua) jenis yaitu Upaya Hukum Biasa yang diatur pada BAB XVII KUHAP dan Upaya Hukum Luar Biasa yang diatur pada BAB XVIII KUHAP. Upaya Hukum Biasa terdiri dari:

1. Pemeriksaan Tingkat Banding menurut Pasal 67 KUHAP yaitu Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta Banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap Putusan bebas, lepas dari segala tuntutan Hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan Hukum dan Putusan Pengadilan dalam acara cepat.
2. Pemeriksaan Untuk Kasasi adalah M.Terdhadap Putusan Perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan Putusan khususnya dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual harus dapat memberikan Putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Pengambilan Keputusan oleh Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana dengan mendasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dapat meyakinkan Hakim. Sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Dalam memberikan keterangan yang didengar pertama-tama adalah Saksi yang menjadi Korban dan sebelum memberi keterangan Saksi Korban wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.

Suatu bentuk Putusan dari Hakim merupakan sebuah Hukum bagi Terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah Hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah Yurisprudensi yang diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu Perkara yang sama. Apabila suatu Perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah Yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap Putusan Hakim.

Salah satu Perkara Perbuatan Cabul yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menarik untuk dikaji lebih mendalam yang melibatkan seorang oknum Dosen terhadap mahasiswinya adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 336/Pid.B/2013/PN.Pms. tanggal 10 April 2014, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 18.30 WIB, sedang mengadakan kuliah perpajakan di Universitas Simalungun kepada Korban atau para Saksi. Terdakwa yang merupakan Dosen pengajar mata kuliah perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun, setelah perkuliahan dimulai, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV tentang fotokopi materi perkuliahan sambil mendekati masing-masing Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV. Sewaktu inilah terjadinya perbuatan

Cabul karena Terdakwa meremas Payudara ke-empat mahasiswanya yang juga sebagai Saksi dalam Perkara ini.

Berdasarkan paparan singkat di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dan Penulisan Hukum yang berjudul : “ARGUMENTASI ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PERBUATAN CABUL OLEH DOSEN (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1456/K/Pid/2014)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang ingin penulis kemukakan yaitu :

1. Apakah Argumentasi Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan bebas *Judex Factie* dalam Perkara Perbuatan Cabul oleh Dosen telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP?
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Perbuatan Cabul Oleh Dosen telah sesuai dengan Pasal 256 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

“Penelitian Hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu Hukum yang timbul” (Peter Mahmud Marzuki, 2013:41). Di setiap kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai suatu target dalam penelitian sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi (tujuan objektif) atau untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif). Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis mengkategorikan tujuan penelitian ke dalam kelompok tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Mengetahui Kesesuaian Argumentasi Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan bebas *Judex Factie* dalam Perkara Perbuatan Cabul oleh Dosen dengan Pasal 253 KUHAP.
- b. Mengetahui kesesuaian pertimbangan Hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul oleh Dosen dengan 256 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

2. Tujuan Subektif

- a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata 1 (sarjana) dalam bidang ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Menambah wawasan/pengetahuan penulis dibidang Hukum Acara Pidana khususnya terkait Argumentasi Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam Penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan sarana bagi penulis untuk mengumpulkan bahan Hukum sebagai penyusunan Penulisan Hukum/ Skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum pada umumnya, dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.

- c. Penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam menerapkan ilmu yang akan diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh Penulis.
- b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Menurut H.J. van Eikema Hommers sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Apa yang dikemukakan mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang (H.J. van Eikema Hommers dalam Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 11).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum (*legal research*) adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan koherensi, yaitu adakah aturan Hukum yang sesuai dengan norma Hukum dan adakah norma yang bersifat perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip Hukum serta apakah tindakan seseorang tersebut sudah sesuai dengan norma Hukum sehingga cukup disebut dengan penelitian yang bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013:47-49).

Penulis memilih penelitian Hukum yang bersifat normatif karena berkenaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap tinjauan Yuridis alasan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan bebas *Judex Factie* dibutuhkan penalaran atau

analisis dari aspek Hukum normatif (Jhony Ibrahim, 2006:127). Selain itu menurut penulis sumber penelitian yang digunakan adalah sumber Hukum Sekunder. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian Hukum normatif yang dipilih oleh penulis sudah sesuai dengan obyek kajian atau isu Hukum yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Ilmu Hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagaimana ilmu yang bersifat Preskriptif, ilm Hukum mempelajari tujuan Hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan Hukum, konsep-konsep Hukum, dan norma-norma Hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu Hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan Hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 22). Oleh karena itu dalam penulisan Hukum ini penulis memberikan tinjauan Yuridis alasan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan bebas *Judex Factie* pada Perkara Perbuatan Cabul oleh Dosen (Studi Putusan 1456/k/Pid/2014)

3. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki (2014:133) menyatakan bahwa di dalam penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu Hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian Hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan kelima jenis pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki tersebut, jenis pendekatan dalam penelitian Hukum ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan

isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan Hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok pendekatan kasus (*case approach*) yaitu terhadap kasus tindak Pidana Perbuatan Cabul oleh Dosen yang diajukan Upaya Hukum Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456/K/Pid/2014 untuk mengetahui *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu alasan-alasan Hukum Hakim untuk sampai pada Putusannya. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pemecahan isu Hukum memerlukan sumber-sumber penelitian. Sumber Hukum penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan Hukum primer dan bahan-bahan Hukum sekunder. Bahan Hukum primer merupakan bahan Hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan –bahan Hukum primer terdiri dari perUndangan-Undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan Putusan-Putusan Hakim. Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus Hukum, jurnal-jurnal Hukum dan komentar-komentar atas Putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). Adapun bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku teks ,kamus-kamus Hukum, jurnal-jurnal Hukum dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan berasal dari bahan cetakan maupun penelusuran internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normative maka untuk memperoleh bahan Hukum yang mendukung, kegiatan pengumpulan bahan Hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*), yang mana studi pustaka ini dilaksanakan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, surat kabar, majalah, internet, peraturan Perundang-undangan dan dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan dasar penyusunan penulisan Hukum ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan Hukum yang digunakan adalah analisis bahan Hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan Hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi. Yang dimaksud dengan deduksi silogisme adalah merumuskan fakta Hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor. Pola berpikir deduktif adalah dari pernyataan mayor yang bersifat umum ke pernyataan minor yang bersifat khusus. Premis mayor yang dimaksud adalah aturan Hukum, sedangkan premis minor adalah fakta Hukum dan dari kedua hal tersebut akan ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki.2014:89-90).

Adapun dalam penulisan Hukum ini yang dimaksud dengan premis mayor adalah aturan Hukum dalam KUHAP dan premis minor adalah fakta Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/2014, dari kedua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan/konklusi untuk menjawab isu Hukumnya.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan Hukum ditujukan untuk dapat lebih memberikan gambaran yang lebih luas dan jelas, komprehensif, dan menyeluruh mengenai bahasan yang disusun. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan Hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan Hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan Hukum, maka penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan Hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman mengenai seluruh isi penulisan Hukum ini. Adapun sistematika penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai penulisan Hukum yang disusun, maka penulis menguraikan dalam suatu sistematika penulisan Hukum. Adapun sistematika penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan Hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan tentang Argumentasi Hukum, tinjauan tentang *Judex Factie*, tinjauan tentang Penuntutan dan Penuntutan Umum, tinjauan tentang Kasasi, tinjauan tentang Putusan, tinjauan tentang pertimbangan Hakim dan tinjauan tentang Tindak Pidana Pen-Cabulan. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menyajikan tentang hasil penelitian beserta pembahasan yang meliputi:

- 1) Kesesuaian Argumentasi Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan bebas *Judex Factie* dalam Perkara Perbuatan Cabul oleh Dosen dengan Pasal 253 KUHP.
- 2) Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Perbuatan Cabul oleh Dosen dengan Pasal 256 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran yang berdasarkan pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Argumentasi Hukum

Argumentasi Hukum berasal dari istilah *Argument* dari bahasa latin *Agrue* yang berarti menjelaskan. Alasan-alasan (bukti) yang ditawarkan untuk mendukung atau menyangkal sesuatu (Rakmad, 1995: 22-23).

Istilah *Argument* di dalam kamus Hukum diberikan arti sebagai alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Ber-Argumen, berarti berdebat dengan saling mempertahankan atau menolak masing-masing. Istilah Argumentasi, diartikan sebagai pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Berargumentasi berarti memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. (Sudarsono, 1992: 36)

Argumentasi Hukum yaitu alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan Asas Hukum, Norma Hukum dan Peraturan Hukum konkret, serta Sistem Hukum dan Penemuan Hukum. Argumentasi Hukum merupakan suatu ketrampilan ilmiah yang bermanfaat untuk dijadikan pijakan oleh para ahli Hukum dalam mendapatkan dan memberi solusi Hukum.

Setiap pengacara atau Hakim tidaklah ber-Argumentasi dari keadaan yang hampa pastilah dimulai dari Hukum positif, dari suatu Hukum positif para Yuridis akan menemukan suatu

norma-norma yang baru yang nantinya dari asas-asas tersebut dapat mengambil Keputusan-Keputusan yang baru.

2. Tinjauan tentang *Judex Factie*

Hukum di Indonesia ada *Judex Factie* dan *Judex Jurist* adalah dua tingkatan Peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil Keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *Judex Factie*, yaitu berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu Perkara. *Judex Factie* dalam memeriksa dan memutus Perkara adalah berdasarkan surat Dakwaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh Penuntut Umum. *Judex Factie* memeriksa bukti-bukti dari suatu Perkara dan menentukan fakta-fakta dari Perkara tersebut karena *Judex Juris* atau Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan Hukum dari suatu Perkara, dan tidak memeriksa fakta dari Perkara tersebut.

3. Tinjauan tentang Penuntut Umum dan Penuntutan

a. Pengertian Penuntut Umum.

Ada perbedaan dengan Jaksa dan Penuntut Umum, hal ini diatur di Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP yaitu pada huruf a : Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, pada huruf b : Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

b. Pengertian Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan Perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan sUpaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan”.

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, namun perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas “Terdakwa”, sedangkan dalam KUHAP tidak. “Menuntut seorang Terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan Perkara seorang Terdakwa dengan berkas Perkaranya kepada Hakim, dengan permohonan, sUpaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan Perkara Pidana itu terhadap Terdakwa.” (Wirjono Prodjodikoro, 1974:34).

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum yang berwenang melakukan Penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah Hukumnya dengan melimpahkan Perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili (Andi Hamzah, 1990: 162).

c. Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum

Menurut E. Bonn dan R.H.K Sosrodanukusumo, (pendapatnya masih berdasarkan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)), seorang Jaksa mempunyai daerah Hukum masing-masing sesuai dengan daerah Hukum masing-masing sesuai dengan daerah Hukum Pengadilan Negeri di mana dia diangkat. Seorang Jaksa di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung hanya dapat menuntut orang jika ia terlebih dahulu diangkat untuk Kejaksaan Negeri yang daerah Hukumnya dilakukan delik tersebut. Dalam praktik, seorang Jaksa yang ditempatkan di suatu Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung yang akan menjadi Penuntut Umum suatu delik di suatu Pengadilan Negeri, ia diangkat terlebih dahulu (didetansir) di Kejaksaan Negeri yang wilayah Hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri tersebut (Andi Hamzah, 1990: 162).

Mengenai kebijakan Penuntutan, dalam Pasal 139 KUHAP, Penuntut Umum yang menentukan suatu Perkara hasil Penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Menurut pertimbangan Penuntut Umum, suatu Perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah Perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka Penuntut Umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada Tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP). Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada Tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik, dan Hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Ini biasa disebut sebagai Surat Perintah Penghentian Penuntutan.

Mengenai wewenang Penuntut Umum untuk menutup Perkara demi Hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “Perkaranya ditutup demi Hukum” diartikan sesuai dengan Buku I Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUHP, (*nebis in idem*, Terdakwa meninggal, dan lewat waktu) (Andi Hamzah, 1990: 163).

Kewenangan Penuntut Umum harus sesuai dengan Undang-Undang:

The constitutionally limited role of the prosecutor is to “take care that the laws be faithfully executed”— that is, to enforce the policies laid down in laws enacted by the legislature. Whether this was ever true, it is certainly not the case today that prosecutors are merely enforcing pre-established rules. Armed with expansive criminal codes and broadly worded statutes, plus the ability to threaten harsh and mandatory sentences, prosecutors have so much leverage in negotiations with defendants that they have, for

all practical purposes, taken on the role of adjudicator as well. The prosecutor alone decides a defendant's liability and sentence (Rachel E. Barkow.2009. "*The Prosecutor as Regulatory Agency*". *Public Law and Legal Theory Research Journal Series*. Vol. 40, No. 9.: 1).

Terjemahan bebas: Peran konstitusional terbatas Jaksa adalah untuk "menjaga agar Hukum akan dieksekusi dengan tepat" - yaitu, untuk menegakkan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yang disahkan oleh legislatif. Apakah ini benar, hal ini tentu tidak terjadi hari ini, bahwa Jaksa hanya menegakkan aturan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan berbekal kode Pidana dan Undang-Undang yang luas, ditambah dengan kemampuan untuk mengancam dengan Hukuman yang berat dan yang menjadi kewajiban, Jaksa memiliki begitu banyak pengaruh dalam negosiasi dengan Terdakwa yang mereka miliki, untuk semua tujuan praktis, diambil pada peran Hakim juga. Jaksa sendiri yang memutuskan kewajiban bagi Terdakwa dan Hukumannya.

Hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan bahwa jika kemudian ternyata ada alasan baru untuk menuntut Perkara yang telah dikesampingkan karena kurang bukti-bukti, maka Penuntut Umum dapat menuntut Tersangka (Pasal 140 ayat (2) butir d KUHAP). Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketetapan Penuntut Umum untuk menyampingkan suatu Perkara (yang tidak didasarkan kepada asas oportunitas), tidak berlaku asas *nebis in idem* (Andi Hamzah, 1990: 163).

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 141 KUHAP bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan Perkara dengan satu surat Dakwaan. Tetapi, kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh Pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah (Andi Hamzah, 1990: 163-164):

- a) Beberapa Tindak Pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

- b) Beberapa Tindak Pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; dan
- c) Beberapa Tindak Pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Apa yang dimaksud dengan kata “penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan” tidak disebut, dan penjelasan Pasal tersebut mengatakan cukup jelas. Yang dijelaskan ialah kata “bersangkutan-paut” (Andi Hamzah, 1990: 164):

- a) Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
- b) Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; atau
- c) Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan delik lain atau menghindarkan diri dari pemindahan karena delik lain.

Kebalikan dari penggabungan Perkara, Penuntut Umum dapat memecahkan Perkara menjadi lebih daripada satu. Hal itu diatur dalam Pasal 142 KUHP (Andi Hamzah, 1990: 164).

4. Tinjauan tentang Kasasi

a. Pengertian Kasasi

Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung terkait dengan penerapan Hukum lembaga-lembaga dibawahnya dalam hal ini adah Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi, Kasasi diajukan karena Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan, sehinga Majelis Hakim harus

memeriksa ulang terhadap penerapan Hukumnya. Dalam hal ini Hakim dianggap memiliki fungsi sebagai pembuat Hukum atau :*“The law-marking function of judges in general, and more specifically of the judges of the court of justice, was and continues not only to provoke debates and confront opposing ideologies regarding the functions, powers and limits of the judiciary in our society” (Oreste Pollicino.2004. legal reasoning of the court of justice in the context of the principle of equality between judicial activism and self-restraint. German law journal. Vol.05, No 03: 283)”*.

Pengertian bebas penulis berarti: “fungsi Hukum bagi Hakim umumnya dan Hakim Pengadilan khususnya, seringkali memunculkan perdebatan dan tidak jarang pelaksanaan fungsi Hukum ini bertentangan dengan ideologi, fungsi, wewenang dan batas-batas Pengadilan dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan sudut pandang dari Hakim terhadap pelaksanaan fungsi Hukum”.

Hak Penuntut Umum atau Terdakwa untuk tidak menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PN) dengan mengajukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan tata cara yang diatur menurut Undang-Undang (Pasal 12 jo. Pasal 233 s/d Pasal 243 KUHAP).

Upaya Hukum Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas Putusan-Putusan Pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Hal ini karena Perkara dalam tingkat Kasasi diperiksa kembali seperti yang dilakukan *Judex*

Factie, tetapi hanya diperiksa masalah Hukum/ penerapan Hukumnya (Lilik Mulyadi 2012:259-260).

Upaya Kasasi adalah hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum. Jadi, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang tidak puas akan Putusan dari tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Kasasi ke Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung. Karena merupakan hak dan bukan kewajiban maka tergantung para pihak itu sendiri hendak mengajukan Kasasi atau tidak.

Kasasi Mahkamah Agung dapat menggariskan, memimpin dan *uitbouwen* dan *voorbouwen* (mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut) Hukum melalui Yurisprudensi. Dengan demikian ia dapat mengadakan adaptasi Hukum sesuai dengan derap dan perkembangan dari masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila Perundang-undangan itu sendiri kurang gerak sentuhnya dengan gerak dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri (Oemar Seno Adji, 1985: 43).

Semua Putusan Pidana pada tingkat terakhir selain dari pada Putusan Mahkamah Agung itu sendiri, dapat diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi oleh Terdakwa atau Penuntut Umum. Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat keadaan tertentu, terhadap semua Putusan Perkara Pidana yang diambil oleh Pengadilan pada tingkat terakhir dapat diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi.

Adapun yang dimaksud dengan Putusan pada tingkat pertama dan terakhir (Tim Modul PUSDIKLAT Kejaksaan RI, 2009:28) adalah:

- a) Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir.

Sebagaimana diketahui ada jenis Perkara dimana Pengadilan Negeri sekaligus bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir. Jenis Perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir adalah Perkara Tindak Pidana ringan yang diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan ringan yang diatur dalam bagian ke-6 paragraf 1 Bab XVI, Pasal 205 KUHAP sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Demikian juga dengan Perkara “Pelanggaran Lalu-Lintas” seperti yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP sampai dengan Pasal 216 KUHAP adalah juga merupakan jenis Perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat Pertama dan Terakhir.

Begitu juga terhadap Putusan Tindak Pidana ringan dan pelanggaran lalu-lintas, tidak dapat dimintakan pemeriksaan Banding, kecuali bila dalam Putusan tersebut disertai dengan Putusan perampasan kemerdekaan sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 205 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (8) KUHAP. Oleh karenanya, terhadap Putusan seperti ini Upaya Hukum yang dapat ditempuh ialah permohonan pemeriksaan Kasasi.

- b) Putusan Pengadilan Tinggi pada Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Tinggi pada Tingkat Banding merupakan Putusan Pengadilan pada Tingkat Terakhir. Karena itu, terhadap semua Putusan Pengadilan Tingkat Banding, dapat dimintakan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan dalam kenyataannya hampir semua hasil Putusan pada tingkat Banding dimana para pihak ada yang merasa tidak puas

selalu akhirnya diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi. Tujuan Upaya Hukum Kasasi antara lain adalah untuk mengoreksi kesalahan Putusan Pengadilan dibawahnya, dapat juga Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu merupakan koreksi sekaligus menciptakan Hukum baru dalam bentuk Yurisprudensi.

Perundang-undangan Belanda mengatur tiga alasan untuk melakukan Kasasi:

- (1) Apabila terdapat kelalaian dalam Acara (*vormverzuim*)
- (2) Peraturan Hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya.
- (3) Apabila tidak dilaksanakannya cara melakukan Peradilan menurut cara yang di tentukan Undang-Undang (Yudhantara Fajar Pradana, Skripsi, 2012:21).

b. Tujuan utama dari Upaya Hukum Kasasi, adalah :

- a) Koreksi Terhadap Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan Salah satu tujuan Kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan Hukum, agar Hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili Perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.
- b) Menciptakan dan Membentuk Hukum Baru Di samping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam Peradilan Kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk Judge Making Law, sering Mahkamah Agung menciptakan Hukum baru yang disebut “Hukum

Kasus”, guna mengisi kekosongan Hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan Undang-Undang sesuai dengan “Elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila Putusan Kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan Hukum maupun yang bersifat penciptaan Hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi Pengadilan dalam mengambil Keputusan maka Mahkamah Agung akan menjadi Yurisprudensi tetap.

c) Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum

Tujuan lain pemeriksaan Kasasi yaitu untuk mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan Hukum. Dengan adanya Putusan Kasasi yang menciptakan Yurisprudensi, maka akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan Hukum, serta dengan adanya Upaya Hukum Kasasi, dapat terhindar dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para Hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

c. Syarat-Syarat Pengajuan Kasasi

Syarat Kasasi dalam penggunaan Upaya Hukum Kasasi adalah:

- a) Permintaan Kasasi diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.
- b) Permintaan Kasasi diajukan terhadap Putusan Pengadilan yang diberikan pada tingkat terakhir selain Mahkamah Agung. Dengan adanya Keputusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012, Putusan bebas dapat diajukan Kasasi.

- c) Pemeriksaan Kasasi dilakukan Mahkamah Agung
- d) Perkara yang dibatasi Pengajuan Kasasinya
- e) Permohonan Kasasi terhadap Perkara tersebut atau permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal. Dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua Pengadilan tingkat pertama dan berkas tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dan tidak dapat diajukan Upaya Hukum.
- f) Permintaan Kasasi diajukan dalam waktu 14 hari sesudah Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi diberitahukan kepada Tedakwa, yang diajukan kepada Panitera Pengadilan yang memutus Perkaranya tingkat pertama.
- g) Permintaan Kasasi hanya dapat diajukan satu kali.
- h) Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi, yang memuat alasan-alasan dari Pemohonan Kasasinya dan dalam jangka waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut harus sudah menyerahkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus Perkaranya dalam tingkat pertama.
- i) Pengajuan tambahan dalam Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi dapat dilakukan oleh salah satu pihak dilakukan dalam batas waktu 14 hari.

d. Tata Cara Pengajuan Kasasi

Cara atau proses dalam pelaksanaan Upaya Hukum Kasasi sesuai Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP ialah sebagai berikut:

- a) Permintaan Kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.
- b) Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu 14 hari setelah pengajuan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang memberikan surat tanda terima.
- c) Apabila dalam jangka waktu 14 hari, pemohon terlambat menyerahkan Memori Kasasi, maka hak untuk mengajukan Permohonan Kasasi menjadi gugur.
- d) Tembusan Memori Kasasi disampaikan kepada pihak lain yang berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi, yang tembusannya disampaikan kepada pihak yang semula mengajukan Memori Kasasi.
- e) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi, diberi kesempatan untuk mengajukan tambahan dalam tenggang waktu 14 hari.
- f) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu Pengajuan Kasasi atau Pengajuan Memori Kasasi tersebut, permohonan Kasasi tersebut selengkapanya (berkas Perkara Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi) disampaikan kepada Mahkamah Agung, dimana bila Panitera Mahkamah Agung telah menerima kemudian dicatat dalam buku agenda surat, register Perkara dan kartu petunjuk.

- g) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi.
- h) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 orang Hakim atas dasar berkas Perkara yang diterima nya, yang jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa/ Saksi/ Penuntut Umum atau Mahkamah Agung dapat memerintahkan Pengadilan yang bersangkutan.
- i) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa Permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan tenggang waktu, mengenai Hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan Permohonan Kasasi.
- j) Jika Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi, maka Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dengan cara:
 - (1) Bila Putusan dibatalkan karena Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak semestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri Perkara tersebut.
 - (2) Bila Putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar Pengadilan yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu

dapat menetapkan Perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan setingkatnya yang lain.

- (3) Bila Putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili Perkara tersebut, maka Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan atau Hakim lain mengadili Perkara tersebut.

k) Penolakan Permohonan Kasasi jika:

- (1) Melewati tengang waktu penyampaian Permohonan Kasasi kepada Panitera Pengadilan, yaitu 14 hari (Pasal 245 KUHAP).
- (2) Sudah ada Keputusan Kasasi sebelumnya mengenai Perkara tersebut. Kasasi hanya dilakukan sekali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP).
- (3) Pemohon tidak mengajukan Memori Kasasi atau tidak memberitahukan alasan Kasasi kepada Panitera, atau terlambat mengajukan Permohonan Kasasi Pasal 248 ayat (1) dan (2) KUHAP.
- (4) Tidak ada alasan Kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bila dilihat dari ketentuan tersebut di atas terdapat unsur-unsur dalam prosedur Pengajuan Kasasi, yaitu:

- (1) Yang dapat mengajukan Kasasi yaitu Terdakwa (atau yang dikuasakan secara khusus) dan Penuntut Umum

(2) Jangka Waktu

Permintaan Kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi diberitahukan kepada Terdakwa, jika tengang

waktu itu telah lewat dan pemohon terlambat mengajukan Permohonan Kasasi maka hak untuk itu dinyatakan gugur dan yang bersangkutan dianggap menerima Putusan. Panitera juga harus membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas Perkara.

(3) Pengajuan

Permintaan Kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus Perkara pada tingkat pertama, selanjutnya oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon serta dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas Perkara.

(4) Pemberitahuan kepada pihak lain

Atas permintaan Kasasi yang diajukan dan Pengadilan Negeri menerima permohonan Kasasi, baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa sekaligus, maka Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lainnya (Susilo Yuwono, 1982: 164-165).

e. Putusan Mahkamah Agung terhadap Putusan Kasasi

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkup Peradilan karena:

- (a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- (b) Salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku
- (c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam

kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan (Pasal 30 Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dalam hal berikut :

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf (a), maka Mahkamah Agung menyerahkan Perkara tersebut kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya.
- (2) Dalam hal ini Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf (b) dan huruf (c), maka Mahkamah Agung memutus sendiri Perkara yang dimohonkan Kasasi itu. (Pasal 51 Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

5. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan bukan semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan Hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam Persidangan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan Hakim sebagai dasar untuk memutuskan suatu Perkara adalah

- (1) Melihat kesalahan pembuat atau pelaku Tindak Pidana.
- (2) Memperhatikan motif dan tujuan pelaku melakukan Tindak Pidana
- (3) Hakim juga dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Menurut Soedikno (1999:107) bahwa Negara Indonesia menganut asas "*the persuasive of president*" yang menurut asas ini

bahwa Hakim diberi kebebasan dalam memutuskan suatu Perkara tanpa terikat dengan Keputusan Hakim terdahulu sehingga Hakim dapat mengambil Keputusannya berdasarkan keyakinannya. Namun kebebasan itu tidak mutlak adanya, karena Keputusan yang diambil harus Konstitusional dengan tidak sewenang-wenang dan harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

Berdasarkan dengan uraian di atas bahwa kekuasaan Kehakiman mengandung pengertian bahwa kekuasaan Kehakiman itu sendiri tidak ada campur tangan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, agar apa yang diputuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan 2 (dua) pihak yang berPerkara memiliki rasa kepuasan atas Putusan Hakim dan mencapai tujuan Hukum yang sebenarnya yaitu rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pertimbangan Yuridis dalam menjatuhkan Putusan terhadap suatu Perkara, terlebih Putusan bebas (*vrijspraak*), Hakim harus benar-benar menghayati arti Amanah dan Tanggung Jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang didasarkan oleh fakta-fakta Yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam Putusan. Lilik Mulyadi (2007 : 193-194) mengemukakan bahwa : “Hakikat pada pertimbangan Yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu Tindak Pidana yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum Putusan Hakim.”

Pertimbangan Non-Yuridis menurut Lilik Mulyadi yaitu:
 “Pertimbangan non-Yuridis dapat dilihat dari latar belakang

Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, dan agama Terdakwa”.

6. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan dan Isi Putusan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, menerangkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan Hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 182 ayat (6) KUHAP juga menerangkan, bahwa Putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan pemufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara:

- (1) Putusan diambil dengan suara terbanyak
- (2) Jika yang tersebut pada angka 1 tidak juga dapat diperoleh Putusan, dipilih ialah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa.

Yahya Harahap berpendapat bahwa Putusan akan dijatuhkan Pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah Hakim berdasarkan Penilaian yang mereka peroleh dari surat Dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan (Yahya Harahap, 2002 : 247). Setiap Keputusan Hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

a) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Terkait dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah Persidangan dimulai dan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan maka Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan Eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara

lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika majelis Hakim berpendapat sama dengan Penasihat Hukum maka dapat dijatuhkan Putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP)

- b) Putusan yang menyatakan bahwa Dakwaan batal demi Hukum

Dakwaan batal demi Hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat Dakwaan tidak cermat, kurang jelas dan tidak lengkap. Mengenai surat Dakwaan yang batal demi Hukum ini dapat didasari oleh Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor: 808/K/Pid/1984 tanggal 6 Juni yang menyatakan: “Dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi Hukum.”

- c) Putusan yang menyatakan bahwa Dakwaan tidak dapat diterima

Putusan yang menyatakan bahwa Dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangan cermatan Penuntut Umum sebab Putusan dijatuhkan karena:

- (1) Pengaduan yang diharuskan bagi Penuntut dalam delik aduan tidak ada.
- (2) Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah pernah diadili (*ne bis in dem*).
- (3) Hak untuk Penuntutan telah hilang karena daluwarsa atau *verjaring*.

- b. Macam-macam Putusan Pengadilan

- a) Pemidanaan atau Penjatuhan Pidana

Pasal 193 ayat (1) KUHAP mengatur tentang Putusan Pemidanaan, yaitu jika Pengadilan berpendapat bahwa

Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi Hukuman Pidana oleh sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dan Putusan Pemidanaan juga harus memuat Pasal 197 Ayat (1) f KUHP yang menyatakan tentang Pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Hukum dari Putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Putusan Pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan Terdakwa dapat diPidana (Andi Hamzah, 2002 : 281).

b) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 Ayat (2) mengatur tentang Putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum, berbunyi: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi tindakan itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan Hukum.” Pada masa yang lalu Putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 Ayat (2), yakni Putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum, berdasar kriteria:

- (1) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- (2) Tetapi sekalipun terbukti, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan Tindak Pidana.

Pasal 191 Ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa, “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.” Kata kesalahan multi interpretasi, karena bisa hanya berarti *opzet* atau *culpa*, atau berarti sifat dapat dicelanya pembuat delik tersebut. Mengingat KUHP menganut paham monistis, dimana *opzet* atau *culpa* dapat dirumuskan menjadi *bestanddeel delict* dan diputus lepas dari segala tuntutan Hukum dalam hal *opzet* atau *culpa* menjadi unsur diam-diam (*elemen delict*).

Apabila kesalahan berarti sifat dapat dicela orang yang melakukan Tindak Pidana, sehingga dalam hal ini Putusan bebas dijatuhkan karena Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana, maka Putusan bebas tersebut hanya dapat dijatuhkan bukan hanya karena tidak terbuktinya *criminal act* tetapi juga *criminal liability*.

Dalam hal ini Putusan bebas dijatuhkan ketika *criminal act* terbukti tetapi *criminal liability* tidak terbukti, maka Putusannya dapat dikategorikan bebas tidak murni atau *nietzuivere vrijspraak*. Bebas tidak murni adalah Putusan “lepas dari segala tuntutan Hukum terselubung” atau *bedekte onslag van rechtvervolging* (Yudhantara Fajar Pradana, Skripsi, 2012: 36).

c) Putusan Bebas

Putusan bebas berarti Terdakwa dijatuhi Putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan Hukum (*vrijpraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Hukum, maksudnya dibebaskan dari Pemidanaan atau dengan kata lain Terdakwa tidak diPidana. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan bahwa

apabila Pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas

7. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pen-Cabulan

Kata “Cabul” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti sebagai berikut : “Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan)”.

Perbuatan Cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu Seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya (Adami Chazawi 2005 : 80).

Perbuatan Cabul melanggar Kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo 1996 : 212).

Tindak Pidana Kesusilaan mengenai perbuatan Cabul dirumuskan dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing sebagai berikut (Adami Chazawi, 2007 :78-113) :

a. Tindak Pidana menyerang Kehormatan Kesusilaan

Kualifikasi perbuatan menyerang Kehormatan Kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat Cabul dirumuskan

dalam Pasal 289 KUHP yang selengkapnya berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan. Perbuatan Cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan Pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

- b. Tindak Pidana Pen-Cabulan terhadap Orang Pingsan, Orang belum berumur Lima Belas Tahun, dan lain-lain
Kejahatan yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal 290 KUHP sebagai berikut :

Diancam dengan Pidana penjara paling lama Tujuh Tahun:

- (1) Barang siapa melakukan Perbuatan Cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barang siapa melakukan Perbuatan Cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum Lima Belas Tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum Lima Belas Tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

- c. Tindak Pidana Pen-Cabulan sesama Kelamin (HomoSeksual)

Kejahatan Homo Seksual yang di maksud diatas dirumuskan dalam Pasal 292 yang rumusannya sebagai

berikut: “Orang dewasa yang melakukan Perbuatan Cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan Pidana penjara paling lama Lima Tahun”.

Tindak Pidana menggerakkan orang belum dewasa melakukan Pen-Cabulan. Kejahatan Kesusilaan yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal 293 KUHP selengkapnya sebagai berikut :

- a) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalah gunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus atau diduganya, diancam dengan Pidana penjara paling lama Lima Tahun.
- b) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- c) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan Dua Belas bulan.
- d. Tindak Pidana Pen-Cabulan terhadap Anak, Anak Tirinya, dan lain Sebagainya.

Kejahatan Kesusilaan yang dimaksudkan ini adalah dirumuskan dalam Pasal 294 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a) Barang siapa melakukan perbuatan Cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum

dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan Pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) Tahun.

b) Diancam dengan Pidana yang sama :

(1) Pejabat yang melakukan perbuatan Cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

(2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan Cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

e. Tindak Pidana memudahkan Pen-Cabulan oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, dan lainnya yang belum dewasa.

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 295 KUHP sebagai berikut :

a) Diancam :

(1) Dengan Pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan

mempermudah dilakukan perbuatan Cabul dengannya.

(2) Dengan Pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan Cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan Cabul tersebut.

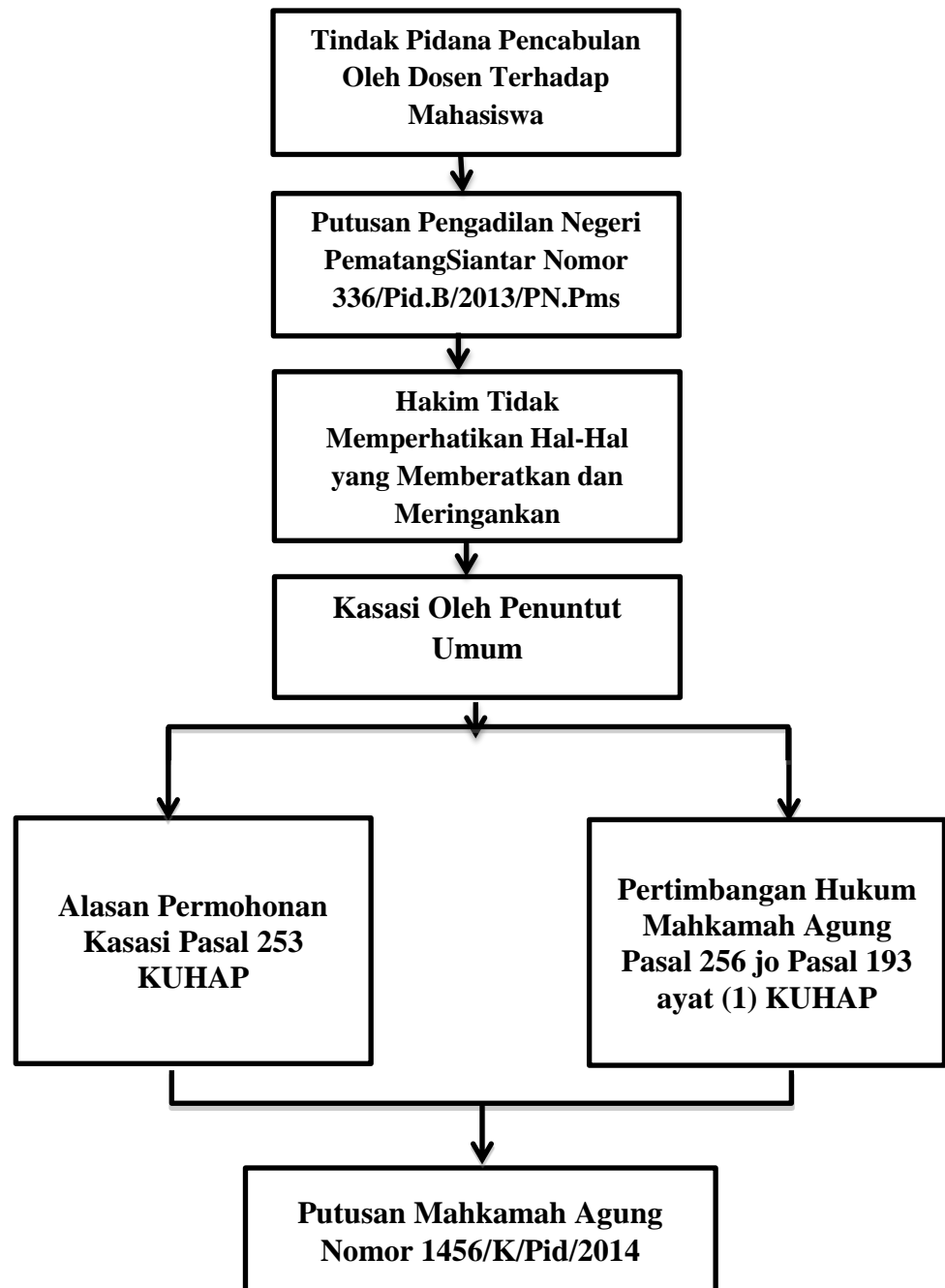
b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka Pidana dapat di tambah Sepertiga.

f. Tindak Pidana menyebabkan dan memudahkan Pen-Cabulan

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 296 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan Perbuatan Cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan Pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau Pidana denda paling banyak Lima Belas ribu rupiah”.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/2014 yang dilakukan oleh penulis, adapun mengenai hal-hal yang penting tentunya terlebih dahulu untuk diketahui sebelum membahas permasalahan selanjutnya, yakni sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Nagajaya
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 04 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Melur Blok A Nomor 1, Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Dosen

2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2013, bertempat di ruang kelas Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (USI) di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya. Bahwa Terdakwa yang merupakan Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun yang aktif berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Simalungun atas nama ROSITA M. GIRSANG, S.E., M.M., Nomor 178/A.07/FE/2013 tertanggal 22 Juli 2013.

Hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi semester genap Tahun Akademik 2012/2013, sedang mengikuti kuliah perpajakan di Universitas Simalungun dari Terdakwa yang merupakan Dosen pengajar mata kuliah perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun, setelah perkuliahan dimulai, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV tentang fotokopi materi perkuliahan dengan mendekati masing-masing Saksi. Sambil Terdakwa menanyakan fotokopi materi perkuliahan kepada masing-masing Saksi secara bergantian saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meremas payudara sebelah kanan para Saksi, kemudian Saksi I pergi dari ruang perkuliahan dan menuju ke ruang Tata Usaha dan bertemu dengan Saksi KRISSI WAHYUNI SARAGIH, S.H. lalu Saksi bercerita perbuatan Cabul Terdakwa sambil menangis dan memperagakan perbuatan Cabul Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi I kembali masuk ke ruangan kelas dan Terdakwa berkata kepada Saksi I “Cukup kita saja yang tahu, jangan tahu orang lain ” kemudian Terdakwa dan Saksi I masuk ke ruangan perkuliahan, lalu Terdakwa kembali melanjutkan pelajaran.

3. Dakwaan

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2013, bertempat di ruang kelas Kampus Universitas, Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, pengurus, dokter, guru, buruh, pengawas atau bujang dipenjara di tempat bekerja kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila atau lembaga (yayasan) amal, yang melakukan perbuatan Cabul dengan orang yang dimasukkan di sana, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang merupakan Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun yang aktif berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun atas nama ROSITA M. GIRSANG, S.E., M.M., Nomor 178/A.07/FE/2013 tertanggal 22 Juli 2013, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi semester genap Tahun Akademik 2012/2013, sedang mengikuti kuliah perpajakan di Universitas Simalungun dari Terdakwa TERDAKWA yang merupakan Dosen pengajar mata kuliah perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun, setelah perkuliahan dimulai, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV tentang fotokopi materi perkuliahan sambil mendekati masing-masing Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV. Pertama kali Terdakwa mendekati Saksi II dan Terdakwa menanyakan fotokopi materi perkuliahan kepada Saksi II, namun saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meremas payudara sebelah kanan Saksi II, kemudian Terdakwa mendekati Saksi III dan Terdakwa menanyakan fotokopi materi perkuliahan kepada Saksi III sambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meremas payudara sebelah kanan Saksi III, namun Saksi III langsung menepis tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi IV, lalu Terdakwa menanyakan fotokopi materi perkuliahan kepada Saksi IV sambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meremas payudara Saksi IV sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati Saksi I, lalu Terdakwa menanyakan fotokopi materi perkuliahan kepada Saksi I, sambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengelus-elus lengan Saksi I, kemudian Terdakwa kembali dengan menggunakan tangan kanannya meremas payudara Saksi I sebelah kanan, kemudian Saksi I mengatakan “ Jangan gitulah Pak ”, dan Terdakwa mengatakan “ Ops sori, saya hilap”, kemudian Saksi I mengambil tasnya dan pergi meninggalkan ruangan perkuliahan dan mengatakan “Permisi Pak”, kemudian Saksi I masuk ke ruangan Kantor Tata Usaha (TU) dan bertemu dengan Saksi KRISSI WAHYUNI SARAGIH, S.H., kemudian

Saksi I sambil menangis bercerita kepada Saksi KRISNI WAHYUNI SARAGIH, S.H., dengan mengatakan “ Kak, aku mau bilang, kami lagi kuliah sama TERDAKWA mata kuliah perpajakan, terus TERDAKWA pertama-tama memegang tanganku terus mengelus-elus bahu, lalu meremas payudaku ” (sambil Saksi I memperagakan perbuatan Terdakwa), tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi I kembali masuk ke ruangan kelas dan Terdakwa berkata kepada Saksi I “ Cukup kita saja yang tahu, jangan tahu orang lain ” kemudian Terdakwa dan Saksi I masuk ke ruangan perkuliahan, lalu Terdakwa kembali melanjutkan pelajaran.

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP

4. Tuntutan

Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, maka tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :

- a. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan tindak Pidana ”Guru yang melakukan perbuatan Cabul” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP.
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- c. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya Perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

5. Amar Putusan Pengadilan Negeri

- a. Menyatakan Terdakwa Drs. Anggiat Sinurat, M.Si tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum.

- c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
- d. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara.

6. Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah salah menafsirkan “ unsur melakukan perbuatan Cabul dengan orang yang ditempatkan di situ” karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan teori-teori dari definisi “perbuatan Cabul ” nya telah menafsirkan lain, sehingga menggunakan kewenangannya dengan bertitik tolak pada “keyakinan Hakim ” meskipun dalam keyakinan itu harus didasarkan atas surat Dakwaan dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dengan bertitik tolak pada alat bukti yang sah. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar ini juga membenarkan bahwa Hakim tidak boleh memutus atau mengadili perbuatan Pidana yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum (halaman 37 dari Putusan Nomor 336 ini).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa semata secara tidak utuh, tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya yang merupakan fakta Yuridis yang ditemukan dalam persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yaitu Saksi II, Saksi I, Saksi III, dan Saksi IV.

Demikian juga keterangan Terdakwa yang menerangkan hanya memegang pundak Saksi I dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa jarinya menyentuh payudara Saksi I, dalam hal ini keterangan Terdakwa yang tidak logika bahwa dengan memegang pundak akan tetapi jari tangannya mengenai payudara Saksi I, namun dalam hal ini sebagai seorang Dosen / Guru tidak seharusnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut biar pun itu hanya jari Terdakwa mengenai payudara dari Saksi I, dan dalam hal ini dapat dilihat kesengajaan Terdakwa agar jarinya menyentuh payudara dari Saksi I.

Dihubungkan lagi adanya Berita Acara Pemeriksaan di Kantor POLRES

Pematang Siantar atas nama Saksi IV tertanggal Rabu 17 Juli 2013 pada poin Nomor 8 (delapan) menerangkan bahwa Saksi ada bertemu dengan Saksi KRISTIA NOVA SIMATUPANG dan Saksi JESSICA RULLYANA OCTORA pada tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib di CAFETARIA USI, pada saat itu Saksi IV mengatakan bahwa dia dan temannya lainnya (kecuali Saksi I) tidak mengalami perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa adapun sebabnya Saksi IV mengatakan seperti itu, karena ia merasa malu tentang kejadian yang dialaminya sendiri, karena ia merasa kejadian tersebut adalah aib bagi dirinya sendiri, apalagi waktu itu situasi kantin sedang ramai dikunjungi oleh orang-orang.

7. Amar Putusan Mahkamah Agung RI No 1456 K/Pid/2014

- a. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut .
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 336/Pid.B/2013/PN.Pms. tanggal 10 April 2014 .
- c. Mengadili sendiri:
Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Guru”.
- d. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- e. Menetapkan Terdakwa segera ditahan.
- f. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
- g. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya Perkara dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

B. Pembahasan

1. Kesesuaian Argumentasi Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas *Judex Factie* dalam Perkara Perbuatan Cabul oleh Dosen dengan Pasal 253 KUHAP.

Upaya Hukum biasa dibedakan menjadi pemeriksaan tingkat Banding pada bagian kesatu dan pemeriksaan untuk Kasasi pada bagian kedua. Rusli Muhammad menjelaskan bahwa Kasasi (*Cassatie*) yaitu “Hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap Putusan Perkara Pidana yang diberikan pada Pengadilan tingkat bawahnya.

Berdasar rumusan Pasal 244 KUHAP dinyatakan bahwa Terhadap Putusan Perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 butir 19 menyatakan bahwa “Terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan Banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, Demi Hukum, Keadilan dan Kebenaran, terhadap Putusan Bebas dapat dinyatakan Kasasi, hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi”. Sehingga jika Penuntut Umum merasa tidak puas terhadap Putusan Bebas atau Lepas dari Pengadilan Negeri dapat diajukan Upaya Hukum Kasasi pada tingkat Mahkamah Agung.

Hal tersebut di atas diperkuat dengan mengingat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2011 yang menghilangkan frasa “kecuali terhadap Putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menyatakan frasa “kecuali terhadap Putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.

Permohonan Kasasi agar dapat diterima untuk diperiksa dan diadili maka harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) yaitu “Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus Perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa”. dan Pasal 248 ayat (1) yaitu “Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.”

Sebagai bukti telah dipenuhi syarat formal dan materiil dalam Pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/Pid.Sus/2014 telah sesuai dengan Pasal-Pasal di atas dan menunjukkan bahwa permohonan Kasasi telah memenuhi syarat formal, sebagai berikut :

- a. Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 336/Pid.B/2013/PN.Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut.
- b. Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 08 Mei 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 08 Mei 2014.

- c. Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 24 April 2014, serta memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 8 Mei 2014, dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Permohonan Kasasi disini juga telah memenuhi syarat materiil, sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah salah menafsirkan “ unsur melakukan Perbuatan Cabul dengan orang yang ditempatkan di situ” dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan teori-teori dari definisi “Perbuatan Cabul ” nya telah menafsirkan lain, sehingga menggunakan kewenangannya dengan bertitik tolak pada “keyakinan Hakim ” meskipun dalam keyakinan itu harus didasarkan atas surat Dakwaan dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dengan bertitik tolak pada alat bukti yang sah.
- b. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa semata secara tidak utuh, tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya yang merupakan fakta Yuridis yang ditemukan dalam persidangan.

Kesalahan penerapan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya disini bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah salah menafsirkan “ unsur melakukan Perbuatan Cabul dengan orang

yang ditempatkan di situ” dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan teori-teori dari definisi “Perbuatan Cabul ” nya telah menafsirkan lain, sehingga menggunakan wewenangannya dengan bertitik tolak pada “keyakinan Hakim ” meskipun dalam keyakinan itu harus didasarkan atas surat Dakwaan dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dengan bertitik tolak pada alat bukti yang sah.

Asas-asas Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan Hukum atau Hakim telah melampaui kekuasaan Kehakimannya. Arti kekuasaan Kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit ialah D. Simons yang mengatakan jika Hakim memutus sesuatu Perkara padahal Hakim tidak berwenang menurut kekuasaan Kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika Hakim Pengadilan Tinggi memutus padahal Hakim pertama telah membebaskan (Andi Hamzah, 2011: 297-298).

Alasan-alasan Kasasi diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, huruf :

- a. apakah benar suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; dan
- c. apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya.

Sesuai yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/2014 bahwa Argumentasi yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung yaitu :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar hanya mempertimbangkan keterangan dari TERDAKWA semata secara tidak utuh, tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya yang merupakan fakta Yuridis yang ditemukan dalam persidangan yaitu :
- b. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian

satu dengan yang lain yaitu Saksi II, Saksi I, Saksi III, dan Saksi IV yang menerangkan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi I, Saksi II, Saksi IV, sedang mengikuti perkuliahan dari Terdakwa yaitu mata kuliah perpajakan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV, tentang fotokopi materi perkuliahan sambil mendekati masing-masing Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, dimana pertama-tama Terdakwa mendekati Saksi II namun saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang payudara sebelah kanan Saksi II, kemudian Terdakwa mendekati Saksi III, namun saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menyentuh payudara sebelah kanan Saksi III, namun Saksi III langsung menipis tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi IV, lalu Terdakwa menanyakan fotokopi materi perkuliahan kepada Saksi IV sambil Terdakwa menggunakan tangan kanannya memegang payudara Saksi IV sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati Saksi I, lalu Terdakwa menanyakan fotokopi materi perkuliahan kepada Saksi I, sambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengelus-elus lengan Saksi I, kemudian Terdakwa kembali dengan menggunakan tangan kanannya memegang / meremas payudara Saksi I sebelah kanan, kemudian Saksi I berkata " Jangan gitulah Pak " dan Terdakwa menjawab " Ops sori, saya hilap" kemudian Saksi I mengambil tasnya dan pergi meninggalkan ruangan perkuliahan dan mengatakan " Permisi Pak "

c. Demikian juga keterangan Terdakwa yang menerangkan

hanya memegang pundak Saksi I dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa jarinya menyentuh payudara Saksi I, dalam hal ini keterangan Terdakwa yang tidak logika bahwa dengan memegang pundak akan tetapi jari tangannya mengenai payudara Saksi I, namun dalam hal ini sebagai seorang Dosen / Guru tidak seharusnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut biar pun itu hanya jari Terdakwa mengenai payudara dari Saksi I, dan dalam hal ini dapat dilihat kesengajaan Terdakwa agar jarinya menyentuh payudara dari Saksi I.

- d. Dihubungkan lagi adanya Berita Acara Pemeriksaan di Kantor POLRES Pematang Siantar atas nama Saksi IV tertanggal Rabu 17 Juli 2013 pada poin Nomor 8 (delapan) yang menerangkan bahwa Saksi ada bertemu dengan Saksi KRISTIA NOVA SIMATUPANG dan Saksi JESSICA RULLYANA OCTORA pada tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib di CAFETARIA USI, dimana pada saat itu Saksi IV mengatakan bahwa dia dan temannya lainnya (kecuali Saksi I) tidak mengalami perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa adapun sebabnya Saksi IV mengatakan seperti itu, karena ia merasa malu tentang kejadian yang dialaminya sendiri, karena ia merasa kejadian tersebut adalah aib bagi dirinya sendiri, apalagi waktu itu situasi kantin sedang ramai dikunjungi oleh orang-orang.
- e. Dengan adanya perbuatan TERDAKWA yang telah memegang payudara sebelah kanan dari Saksi II, juga telah menyentuh payudara sebelah kanan dari Saksi III, juga telah memegang payudara sebelah kanan dari Saksi IV, dan juga telah memegang serta meremas payudara sebelah kanan dari Saksi I, merupakan perbuatan Cabul, karena payudara seorang

perempuan merupakan bagian dari anggota tubuh yang sensitif sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi.

- f. Adanya kalimat yang diucapkan TERDAKWA ketika ia memegang, meremas payudara Saksi I yaitu kalimat : "Ops sori, saya hilap" serta adanya permintaan maaf dari Terdakwa ketika Saksi II, Saksi I, Saksi III dan Saksi IV berada di Kantor KOLAHMAN SARAGIH, sudah menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar Hukum yaitu melakukan perbuatan Cabul.

Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Buku Kedua dikualifikasikan sebagai Kejahatan diatur dalam BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan di Bidang Kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Oleh karena itu Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 sebagaimana mesti bunyinya adalah "Pengurus, Dokter, Guru, Pegawai, Pengawas atau Pesuruh dalam Penjara, Tempat pekerjaan Negara, Tempat Pendidikan, Rumah Piyatu, Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa atau Lembaga Sosial yang melakukan perbuatan Cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya".

Berdasarkan Argumen di atas menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan Hukum dengan memutus Perkara tanpa mempertimbangkan alat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Disebutkan dalam Pasal 183 KUHP menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dengan keterangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan Hukum atau menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak menerapkan Pasal 294 Ayat (2) ke-2

KUHP secara benar dalam memutus Perkara, karena salah menilai unsur-unsurnya.

Pengajuan Kasasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat tentang syarat formil yang tetap harus diperhatikan oleh Hakim. Syarat-syarat yang terdapat dalam KUHP yaitu pada Pasal 253 KUHP, yang menyebutkan :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan
 - a. Apakah benar suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangny.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas Perkara yang diterima dari Pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan Perkara itu beserta Putusan Pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan Kasasi.
- (5) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas Perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa Perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, pengajuan Kasasi juga harus memperhatikan syarat materiil. Terletak pada Pasal 253 KUHAP ayat (1) menyebutkan tentang alasan pengajuan Kasasi bahwa “Pemeriksaan dalam Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Terkait dengan tiga Alasan pengajuan Kasasi tersebut maka penulis akan paparkan secara singkat mengenai alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Perbuatan Cabul Oleh Dosen Putusan Nomor 1456K/Pid/2014 sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP “Apakah benar suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” :

- a. Bahwa Hakim telah salah dan keliru, tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP yang ada dan disebutkan di Pasal tersebut di Hukum Pidana maksimal 7 tahun Penjara bila melakukan Perbuatan Cabul.

- b. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku dengan memutus Perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa; Pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan Putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil Keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan. Majelis Hakim (*Judex Factie*) tidak memperhatikan keterangan Saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa . Di sini sudah ada keterangan dari Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV ditambah juga dengan adanya pernyataan Saksi Krissi Wahyunin Saragih ,S.H. Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP.
- c. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/2014, *Judex Factie* dianggap melakukan kekeliruan dan telah ditunjukkan secara jelas letak kesalahan penerapan Hukumnya. Pemohon Kasasi juga telah menguraikan secara konkrit tentang terdapatnya hal-hal yang memenuhi syarat yang dibenarkan sebagai alasan Kasasi. *Judex Factie* salah menafsirkan “unsur melakukan perbuatan Cabul dengan orang yang ditempatkan di situ” Majelis Hakim (*Judex Factie*) dengan teori-teori dari definisi “perbuatan Cabul ” nya telah menafsirkan lain, sehingga menggunakan kewenangannya dengan bertitik tolak pada “keyakinan Hakim ” meskipun dalam keyakinan itu harus didasarkan atas surat Dakwaan dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dengan bertitik tolak pada alat bukti yang sah.

Sehingga alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/2014 sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Cabul Oleh Dosen Dengan Pasal 256 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu Putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian Hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka Putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto.2004 : 140).

Hakim dalam menemukan Hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada Yurisprudensi dan pendapat para ahli Hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan Putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Proses pembuktian di persidangan sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. Perihal prinsip batas minimum pembuktian sudah diatur secara jelas di Pasal 183 KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Perkara ini memeriksa alat bukti yaitu 5 (lima) orang Saksi.

Pertimbangan Hakim untuk memutuskan Perkara Perbuatan Cabul dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/ Pid/ 2014 perlu dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu aspek Yuridis dan aspek non Yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta Yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam Putusan (Muhammad Rusli.2007 212-220). Pertimbangan Yuridis terhadap tindak Pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting karena pertimbangan Yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap Putusan Hakim. Pertimbangan Yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak Pidana apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak Pidana yang didakwaakan oleh Penuntut Umum.

Pertimbangan yang bersifat Yuridis ini diantaranya yaitu :

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka Pengadilan.

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/ Pid/ 2014 merupakan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHP .

2) Tuntutan Pidana

Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/ Pid/ 2014 sebagaimana dimaksud diancam Pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-2

KUHAP. Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa adalah dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3) Keterangan Saksi

Keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/ Pid/ 2014 ada 5 (lima) orang Saksi yang diajukan Penuntut Umum. Kelima Saksi yang diajukan merupakan Saksi a charge, yaitu Saksi yang memberatkan Terdakwa. Karena keterangan dari kelima Saksi membenarkan bahwa Terdakwa melakukan pen-Cabulan sehingga menguatkan bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana sesuai yang di dakwakan terhadapnya.

4) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e, Keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

Keterangan Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/ Pid/ 2014 bahwa Terdakwa mengakui ia memegang pundak Saksi I dan mengenai jari tangannya di payudara Saksi I. Selain pertimbangan yang bersifat Yuridis, Hakim dalam menjatuhkan Putusan membuat pertimbangan yang bersifat non Yuridis. Pertimbangan Yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa didukung dengan pertimbangan non Yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/ 2014 sesuai dengan KUHAP karena pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

dalam memutus Perkara tersebut dikaitkan dengan 256 KUHAP dengan alasan, apabila suatu Perkara diputuskan tidak sesuai dengan penerapan Pasal yang sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri.

Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan Kasasi Terdakwa oleh Mahkamah Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

Adapun ketentuan Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai Hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”. Dan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

- a. Hal suatu Putusan dibatalkan karena peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri Perkara tersebut.
- b. Hal suatu Putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar Pengadilan memutuskan Perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan Perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan setingkat yang lain.
- c. Hal suatu Putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili Perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan atau Hakim lain mengadili Perkara tersebut.

Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. Kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut (Andi Hamzah.2009: 254).

Disebutkan pula dalam pengambilan Putusan terdapat *Dissenting Opinion* yaitu opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis Hakim yang tidak setuju dengan Keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis Hakim. (Pontang Moerad, 2005: 111) . Menurut KUHAP ada tiga ketentuan dalam *Dissenting Opinion* yaitu :

- (1) Pada Azasnya setiap Putusan itu adalah diambil dengan musyawarah. Musyawarah merupakan bagian dari pada pengetahuan Hakim dalam menganalisa bukti-bukti dan saksi-saksi.
- (2) Putusan diambil dari suara terbanyak , apabila Hakim lebih dari satu orang maka apabila terjadi perbedaan akan diadakan *voting*
- (3) Jika ketentuan pengambilan Keputusan berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak tidak dapat dipenuhi maka diambil Putusan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, maka diambil Putusan yang paling ringan / menguntungkan Terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/ 2014 sudah sesuai dengan KUHAP yaitu menggunakan Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*). Putusan Hakim di dasarkan pada keyakinan bahwa Terdakwa benar melakukan Pen-Cabulan seperti yang di dakwakan terhadapnya. Keyakinan Hakim tersebut berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang.

Alat-alat bukti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar keyakinan Hakim dalam menjatuhkan Pidana.

Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

- (1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber Hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
- (2) Tiap Putusan Pengadilan harus ditanda tangani oleh ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang.

Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus Perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan Putusan yang dibuatnya
- (2) Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan Hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar Hukum yang tepat dan benar.

Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, karena Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga Pengadilan menjatuhkan Pidana. Pasal 193 KUHP :

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan Pidana
- (2) Pengadilan dalam menjatuhkan Putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan Upaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi

ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu

- b. Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan Putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup itu

Putusan Hakim juga harus memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan maupun memberatkan Terdakwa selama persidangan berlangsung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/ 2014 yang dalam Putusannya menjatuhkan Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa :

- a. Hal Yang Memberatkan :
 - (1) Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang pendidik.
 - (2) Perbuatan Terdakwa telah membuat malu para Korban
 - (3) Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik fakultas / universitas
- b. Hal Yang Meringankan :
 - (1) Terdakwa belum pernah diHukum
 - (2) Terdakwa mengakui perbuatannya
 - (3) Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti diuraikan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/ 2014.

Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan terhadap permohonan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengingat ketentuan Pasal 254 dan Pasal 255 ayat (1)

KUHAP yaitu mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 336/Pid.B/2013/PN.Pms. tanggal 10 April 2014 dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Guru” dan menjalani Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya karena Hukuman bukan hanya untuk memberi efek jera semata akan tetapi juga memberikan penyesalan dan mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Penjara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP .

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait kesesuaian antara Pasal 253 KUHAP dengan Argumentasi Penuntut Umum mengajukan Kasasi berdasarkan *Judex Factie* salah menilai pembuktian terhadap Dakwaan kesatu Perkara Pen-Cabulan Oleh Dosen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/2014 dapat dinyatakan sudah sesuai karena Penuntut Umum memperhatikan syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil pada KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan *Judex Factie* atau alasan-alasan pengajuan Kasasi diantaranya adalah adanya fakta dalam persidangan bahwa *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan Hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, keliru menilai unsur Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP bahwa meremas payudara tadalah termasuk perbuatan Cabul. Sehingga seharusnya *Judex Factie* mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum namun *Judex Factie* tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian sehingga *Judex Factie* menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa .
2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo KUHAP dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 336/Pid.B/2013/PN.Pms. tanggal 10 April 2014 dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Guru” dan memberikan Pidana penjara 1 (satu) tahun kepada Terdakwa. Dalam hal ini alasan-alasan Kasasi dijadikan dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusannya. Tindakan Hakim Mahkamah Agung dengan membatalkan Putusan *Judex Factie* yang dimintakan Kasasi sudah benar. Sehingga atas Putusan Pengadilan yang di Kasasi Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Mahkamah Agung mengadili sendiri Perkara tersebut. Dengan demikian Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, Sebab Hukuman bukan hanya untuk memberi efek jera semata akan tetapi juga memberikan penyesalan dan mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Penjara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP .

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian Hukum ini adalah :

1. Hakim dalam menyusun pertimbangan Hukum tentang hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa hendaknya dibuat secara kasuistik yaitu dengan lebih memperhatikan kekhususan yang ada dalam kasus Perbuatan Cabul yang dihadapi sehingga Hakim dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat umum tentang pertimbangan Hakim menjatuhkan Putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hakim sebaiknya menjatuhkan Putusan secara benar dan adil karena Hakim sudah dipercaya oleh masyarakat dalam menegakan Hukum jadi keyakinan Hakim yang murni dari hati nurani dan berdasarkan fakta lah yang seharusnya di pakai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana. Cetakan Kedua*. Bandung: PT. citra Aditya Bakti.
- M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Cetakan ketiga belas. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Oemar Seno Adji. 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Stanko, Elizabeth A. 1996. *Reading Danger: Sexual Harassment, Anticipation and Self-Protection*. Buckingham: Open University Press.
- Susilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*. Bandung: Alumni.
- Tim Modul PUSDIKLAT Kejaksaan RI. 2009. *Modul Upaya Hukum*. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Jurnal

- oreste pollicino. 2004. *legal reasoning of the court of justice in the context of the principle of equality between judicial activism and self-restraint. german law journal*. Vol.05, No 03.
- Rachel E. Barkow. 2009. "The Prosecutor as Regulatory Agency". *Public Law and Legal Theory Reseach Journal Series*. Vol. 40, No. 09.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983

Internet

<http://journal.unair.ac.id/file>.

<http://mahardikanews.com/view/Hukum/686/Kapolres-Siantar-Diprapidkan.html#.WKkV-NJEnIU>